



Jurnal Pendidikan dan Dakwah

<https://internationaljournal-isssh.com/index.php/jpd>

Etika Komunikasi Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Lingkungan di Sumatera Utara

¹Mulki Alfarizi Harahap dan ²Mhd. Latip Kahpi

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
Corresponding Author: mulkialfarizihrp30@gmail.com & latipkahpi@uinsyahada.ac.id

Article Info

Keyword:
*Etika komunikasi,
pembangunan,
lingkungan, Sumatera
Utara*

Abstract

Development in North Sumatra has shown significant growth; however, it has also generated various environmental problems due to weak ethical communication practices. Limited information transparency, low public participation, and biased media narratives have often exacerbated the social and ecological impacts of development. This article aims to analyze the role of communication ethics in development and environmental management in North Sumatra as a prerequisite for achieving sustainable and equitable development. This study employs a qualitative approach using a descriptive analytical method. Data were collected through literature review, analysis of policy documents and environmental reports, and examination of media coverage related to development and environmental issues in North Sumatra. The data were analyzed using qualitative content analysis, focusing on the principles of transparency, public participation, media roles, and ecological justice. The findings indicate that weak information transparency and limited community participation are major factors contributing to conflicts and ecological injustice in development processes. The media play a strategic role as social watchdogs but have not consistently applied ethical communication principles. The discussion confirms that transparent, participatory, and just communication ethics are essential to promoting sustainable development and environmental protection in North Sumatra.

Pembangunan di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan signifikan, namun pada saat yang sama memunculkan berbagai persoalan lingkungan akibat lemahnya praktik komunikasi yang etis. Kurangnya transparansi informasi, minimnya partisipasi publik, serta bias narasi media sering kali memperburuk dampak sosial dan ekologis dari pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran etika komunikasi dalam proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan di Sumatera Utara sebagai prasyarat terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, telaah dokumen kebijakan dan laporan lingkungan, serta analisis pemberitaan media yang berkaitan dengan pembangunan dan isu lingkungan di Sumatera Utara. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif dengan menekankan prinsip transparansi, partisipasi publik, peran media, dan keadilan ekologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya transparansi informasi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama munculnya konflik dan ketidakadilan ekologis dalam pembangunan. Media memiliki peran strategis sebagai pengawas sosial, namun belum sepenuhnya menjalankan fungsi etisnya secara optimal. Pembahasan menegaskan bahwa penerapan etika komunikasi yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan merupakan kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Sumatera Utara terus mengalami perkembangan pesat di berbagai sektor, seperti infrastruktur, industri, dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, percepatan pembangunan tersebut sering kali menimbulkan persoalan lingkungan akibat lemahnya praktik komunikasi yang etis antara pemerintah, pelaku usaha, media, dan Masyarakat (Ramadhan dkk., 2024). Kurangnya transparansi informasi, minimnya partisipasi publik, serta dominasi kepentingan ekonomi berpotensi memicu konflik sosial dan ketidakadilan ekologis. Oleh karena itu, etika komunikasi menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa proses pembangunan dan pengelolaan lingkungan berjalan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan komunikasi yang etis diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui berbagai program sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Yulianti, 2017). Seiring perkembangan zaman, paradigma pembangunan tidak lagi dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks. Deforestasi, pencemaran air, pemanasan global, dan degradasi ekosistem telah menjadi konsekuensi nyata dari pembangunan yang tidak terkendali. Pada titik inilah urgensi etika komunikasi pembangunan dan lingkungan menemukan relevansinya. Komunikasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi atau instruksi, tetapi menjadi ruang dialog kritis yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab (R. A. Akbar dkk., 2023). Etika komunikasi hadir untuk memastikan bahwa proses komunikasi tersebut berlangsung secara jujur, transparan, adil, serta mempertimbangkan dampaknya bagi manusia dan alam (Arifin & Ardhiansyah, 2020). Artikel ini memandang etika komunikasi sebagai fondasi utama dalam penyusunan strategi komunikasi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kelestarian lingkungan.

Diskursus tentang komunikasi pembangunan telah lama berkembang dalam kajian ilmu sosial, terutama sejak negara-negara berkembang mulai mendorong modernisasi pasca kemerdekaan (Ema dkk., 2018). Pada masa itu, komunikasi diposisikan sebagai alat untuk mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Namun perspektif tersebut kini dianggap tidak memadai karena lebih bersifat top-down dan sering mengabaikan aspirasi masyarakat lokal. Dalam konteks lingkungan, pendekatan komunikasi seperti itu justru berpotensi memunculkan konflik sosial dan kerusakan ekologis karena tidak mempertimbangkan pengetahuan lokal, kearifan sosial-budaya, dan kepentingan generasi yang akan datang. Etika komunikasi kemudian hadir untuk menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar serta hak mereka untuk berpartisipasi dalam setiap proses pengambilan

keputusan yang berdampak pada ruang hidup mereka. Etika komunikasi menjadi jembatan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Dalam konteks global, munculnya isu perubahan iklim dan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) semakin mendorong pentingnya komunikasi yang etis (Leontinus, 2022). Banyak negara mulai menerapkan prinsip-prinsip lingkungan dalam perencanaan pembangunan, tetapi implementasinya sering terkendala oleh rendahnya kualitas komunikasi antara pemangku kepentingan. Penyampaian informasi yang tidak transparan, minimnya partisipasi publik, serta dominannya narasi ekonomi dibanding ekologis adalah contoh nyata dari praktik komunikasi yang bermasalah (Santoso & Raharjo, 2021). Padahal keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kemampuan suatu negara membangun komunikasi lintas sektor yang bertanggung jawab dan inklusif. Etika komunikasi pembangunan dan lingkungan menjadi instrumen kritis untuk mengarahkan perubahan pola komunikasi dari sekadar instrumentasi pembangunan menjadi proses dialogis, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang.

Di tingkat lokal, tantangan serupa tampak dalam berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pertambangan, perkebunan skala besar, hingga tata kelola sampah (Ervianto, 2017). Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat seringkali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai dampak lingkungan dari proyek-proyek tersebut. Bahkan tidak jarang proses konsultasi publik dilakukan hanya sebagai formalitas administratif tanpa memberikan ruang dialog yang sejati. Situasi ini menunjukkan adanya pelanggaran etika komunikasi, terutama terkait prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan informasi. Komunikasi yang tidak etis bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menyebabkan kerugian jangka panjang bagi ekosistem. Penegakan etika komunikasi pembangunan tidak dapat lagi dipandang sebagai aksesori moral, tetapi harus menjadi bagian integral dalam setiap proses pengelolaan lingkungan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas komunikasi pembangunan dan lingkungan dari beragam perspektif. Akbar et al. (2019) dan Jaya (2020) menekankan peran komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat, namun belum mengulas dimensi etika secara mendalam. Mulyani dan Hidayat (2020) serta Suryanto dan Rahmawati (2021) mengkaji komunikasi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tetapi fokusnya masih terbatas pada keterbukaan informasi tanpa membahas keadilan ekologis. Studi Novianti et al. (2020) dan Pranata et al. (2021) menyoroti partisipasi masyarakat dan gerakan penolakan pembangunan, namun belum mengaitkannya secara komprehensif dengan etika komunikasi. Sementara itu, penelitian Dharlinda (2019) dan Haris et al. (2024) melihat peran media dalam pembangunan, tetapi belum menempatkan media sebagai aktor etis dalam pengelolaan isu lingkungan. Kajian mengenai keadilan ekologis lebih banyak dibahas dalam konteks hukum dan kebijakan lingkungan (Rahayu, 2012; Pradana, 2025), tanpa integrasi langsung dengan perspektif komunikasi pembangunan.

Berdasarkan peta penelitian tersebut, terlihat adanya gap riset berupa minimnya kajian yang mengintegrasikan etika komunikasi, pembangunan, dan pengelolaan lingkungan secara holistik dalam konteks daerah, khususnya Sumatera Utara. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung parsial, baik terfokus pada aspek komunikasi, partisipasi, media, maupun keadilan ekologis secara terpisah. Novelty artikel ini terletak pada upaya mengintegrasikan keempat aspek tersebut transparansi informasi, partisipasi publik, peran media, dan keadilan ekologis dalam satu kerangka etika komunikasi pembangunan yang kontekstual dan berorientasi keberlanjutan. Dengan mengambil konteks Sumatera Utara, artikel ini menawarkan perspektif baru yang memperkaya kajian komunikasi pembangunan berbasis wilayah serta menegaskan etika komunikasi sebagai fondasi normatif pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan.

Etika komunikasi pembangunan dan lingkungan juga mengharuskan adanya kesadaran moral bahwa alam bukan sekadar objek eksplorasi ekonomi, melainkan entitas yang memiliki nilai intrinsic (Pambudi, 2025a). Ketika pembangunan hanya dipandang sebagai pertumbuhan ekonomi, maka komunikasi yang dibangun pun cenderung bias, menutupi dampak negatif dan menonjolkan keuntungan semata. Dalam situasi ini, etika komunikasi hadir untuk menyeimbangkan narasi pembangunan agar tidak mereduksi lingkungan sebagai korban kemajuan. Pendekatan etis mengharuskan adanya keberpihakan pada prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan ekologis. Dengan kata lain, etika komunikasi menuntut setiap aktor pembangunan pemerintah, korporasi, media, dan masyarakat untuk menempatkan lingkungan sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar komponen yang dapat dikorbankan.

Kehadiran media massa dan media digital memperluas ruang komunikasi pembangunan dan lingkungan (Suri, 2019a). Namun, media juga berpotensi menjadi sumber misinformasi apabila tidak menjalankan prinsip-prinsip etika komunikasi. Kepentingan ekonomi media sering memengaruhi cara mereka membingkai isu lingkungan, sehingga informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan fakta yang terjadi. Media seharusnya berperan sebagai pengawas moral pembangunan, bukan alat legitimasi kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam konteks ini, etika komunikasi menjadi landasan untuk memastikan bahwa media menjalankan fungsinya secara objektif, kritis, dan memihak pada kelestarian ekologis.

Artikel ini memiliki signifikansi akademik dan praktis karena menempatkan etika komunikasi sebagai elemen kunci dalam menjembatani kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan di tingkat daerah. Secara akademik, kajian ini memperkaya literatur komunikasi pembangunan dengan menghadirkan perspektif etika komunikasi yang terintegrasi dan kontekstual di Sumatera Utara. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, media, dan masyarakat dalam

merancang komunikasi pembangunan yang lebih transparan, partisipatif, dan berkeadilan ekologis.

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah: (1) menganalisis praktik transparansi informasi dalam komunikasi pembangunan dan pengelolaan lingkungan di Sumatera Utara; (2) mengkaji peran dan tingkat partisipasi publik dalam proses komunikasi pembangunan yang berdampak pada lingkungan; (3) menelaah peran media dalam mengawal etika komunikasi pembangunan dan isu lingkungan; dan (4) mengidentifikasi implikasi etika komunikasi terhadap terwujudnya keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Pembahasan mengenai etika komunikasi pembangunan dan lingkungan menegaskan bahwa komunikasi bukan hanya aspek teknis dalam pembangunan, tetapi merupakan dimensi moral yang menentukan arah dan kualitas pembangunan itu sendiri. Tanpa etika komunikasi, pembangunan akan terus berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial dan kerugian ekologis. Sebaliknya, dengan menerapkan etika komunikasi yang berkeadilan, partisipatif, dan transparan, pembangunan dapat bergerak menuju orientasi keberlanjutan. Oleh karena itu konsep etika komunikasi pembangunan dan lingkungan harus dipahami sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap proses komunikasi yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artikel ini berupaya mengulas secara komprehensif bagaimana etika komunikasi dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan generasi mendatang.

KERANGKA TEORI

Kajian mengenai etika komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan berpijak pada beberapa grand theory utama dalam ilmu komunikasi dan

studi lingkungan. Grand theory pertama yang relevan adalah teori komunikasi pembangunan. Akbar et al. (2019) menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan pembangunan, tetapi juga sebagai proses dialogis yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jaya (2020) menegaskan bahwa komunikasi pembangunan yang efektif harus bersifat partisipatif dan kontekstual agar mampu merespons kebutuhan sosial dan lingkungan masyarakat lokal. Perspektif ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika, terutama ketika pembangunan berdampak langsung pada ruang hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Grand theory kedua adalah etika komunikasi. Dalam konteks ini, etika komunikasi dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang mengatur proses penyampaian informasi, interaksi, dan pengambilan keputusan publik (Suryanto & Rahmawati, 2021). Al Fai'q et al. (2024) menekankan bahwa etika komunikasi mencakup nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan dalam relasi komunikasi antara aktor yang memiliki ketimpangan kekuasaan. Dian Ayunita et al. (2025) juga menunjukkan bahwa etika komunikasi memiliki implikasi langsung terhadap tanggung jawab sosial dan legitimasi kebijakan publik. Dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan, etika komunikasi menjadi landasan normatif agar proses pembangunan tidak dimanipulasi oleh kepentingan ekonomi atau politik semata.

Kajian ini juga berpijak pada teori komunikasi lingkungan (environmental communication) yang menempatkan komunikasi sebagai instrumen penting dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup. Mulyani dan Hidayat (2020) menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan berperan dalam menyampaikan risiko ekologis, membangun kesadaran kolektif, serta mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan. Novianti et al. (2020) menambahkan bahwa jaringan komunikasi yang kuat dapat memperkuat praktik pembangunan

berbasis lingkungan dan kearifan lokal. Dengan demikian, komunikasi lingkungan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga normatif dan persuasif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.

Grand theory berikutnya adalah teori partisipasi publik dalam pembangunan. Rahayu (2010) dan Delfina (2023) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan indikator utama demokrasi substantif dalam kebijakan publik. Yusup (2014) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat tercapai ketika masyarakat dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks lingkungan, Pranata et al. (2021) menunjukkan bahwa minimnya partisipasi publik sering kali memicu konflik sosial dan penolakan terhadap proyek pembangunan. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa etika komunikasi harus menjamin ruang partisipasi yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.

Selain itu, kajian ini juga menggunakan teori peran media dalam komunikasi pembangunan. Dharlinda (2019) dan Haris et al. (2024) menjelaskan bahwa media memiliki fungsi strategis sebagai penyedia informasi, pembentuk opini publik, dan pengawas kebijakan pembangunan. Media yang menjalankan etika jurnalistik secara konsisten dapat menjadi kontrol sosial terhadap praktik pembangunan yang merusak lingkungan. Namun, media juga rentan terhadap kepentingan ekonomi dan politik yang dapat melemahkan fungsi etisnya (Putri et al., 2025). Oleh karena itu, media diposisikan sebagai aktor moral dalam etika komunikasi pembangunan dan lingkungan.

Grand theory terakhir yang menjadi landasan artikel ini adalah teori keadilan ekologis (ecological justice). Rahayu (2012) dan Linus (2024) menjelaskan bahwa keadilan ekologis menuntut distribusi manfaat dan risiko pembangunan secara adil, serta perlindungan terhadap kelompok yang paling terdampak kerusakan lingkungan. Pradana (2025) menegaskan bahwa keadilan ekologis tidak hanya menyangkut aspek

hukum, tetapi juga komunikasi yang adil dan transparan. Tanpa komunikasi yang etis, keadilan ekologis sulit diwujudkan karena masyarakat kehilangan hak untuk mengetahui dan menentukan masa depan lingkungan mereka.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, artikel ini mengintegrasikan teori komunikasi pembangunan, etika komunikasi, komunikasi lingkungan, partisipasi publik, peran media, dan keadilan ekologis dalam satu kerangka analitis. Integrasi ini penting untuk memahami komunikasi pembangunan tidak hanya sebagai proses teknis, tetapi sebagai praktik moral yang menentukan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial, khususnya dalam konteks pembangunan di Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research yang dikontekstualkan pada isu-isu pembangunan dan pengelolaan lingkungan di Sumatera Utara. Pendekatan ini dipilih karena kajian etika komunikasi bersifat normatif dan analitis, sehingga memerlukan penelusuran mendalam terhadap konsep, teori, dan praktik komunikasi pembangunan yang tercermin dalam berbagai sumber tertulis serta representasi media. Kontekstualisasi lokal dilakukan dengan memfokuskan analisis pada kebijakan, wacana publik, dan dinamika pembangunan lingkungan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara (Pringgar & Sujatmiko, 2020).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen kebijakan pemerintah daerah, laporan pengelolaan lingkungan, serta regulasi pembangunan yang berkaitan dengan isu lingkungan di Sumatera Utara. Data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta pemberitaan media massa dan media daring yang membahas pembangunan, konflik lingkungan, dan komunikasi publik di Sumatera Utara. Pemilihan sumber dilakukan

secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitan dengan fokus penelitian (Fadli, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah literatur secara sistematis. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi. Analisis difokuskan pada empat aspek utama, yaitu transparansi informasi, partisipasi publik, peran media, dan keadilan ekologis dalam praktik komunikasi pembangunan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari literatur akademik, dokumen resmi, dan pemberitaan media (Imanina, 2020). Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai etika komunikasi pembangunan dan pengelolaan lingkungan dalam konteks lokal Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Informasi sebagai Fondasi Etika Komunikasi Pembangunan

Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan komponen paling krusial dalam membangun etika komunikasi pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Transparansi tidak sekadar terkait keterbukaan data, tetapi mencakup kejujuran, kelengkapan informasi, ketepatan waktu penyampaian, serta akses yang setara bagi seluruh pihak yang terdampak. Dalam berbagai kasus pembangunan, temuan menunjukkan bahwa ketidakjelasan alur komunikasi sering menjadi penyebab utama munculnya konflik sosial, resistensi masyarakat, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah maupun pelaku industry (Ramadhani dkk., 2025). Oleh sebab itu, pembahasan ini menegaskan bahwa transparansi informasi bukan hanya tuntutan moral, tetapi kebutuhan struktural demi memastikan pembangunan berjalan secara etis, demokratis, dan tidak merugikan lingkungan.

Temuan penelitian berbasis analisis dokumen dan pemberitaan media memperlihatkan bahwa dalam banyak proyek pembangunan, informasi mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seringkali tidak dipublikasikan secara utuh (Damanik & Hardi, 2025). Masyarakat hanya mendapat ringkasan atau bahkan sekadar informasi normatif yang tidak menjelaskan risiko ekologis secara detail. Padahal, keberadaan AMDAL sejatinya berfungsi untuk memprediksi, mengukur, dan merumuskan mitigasi terhadap potensi kerusakan lingkungan. Ketika dokumen penting ini tidak transparan, maka masyarakat kehilangan hak untuk mengetahui ancaman yang mungkin terjadi terhadap air bersih, udara, tanah, atau ruang hidup mereka. Dalam perspektif etika komunikasi, kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi pilar utama komunikasi pembangunan yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, kurangnya transparansi secara otomatis melemahkan legitimasi sosial suatu proyek pembangunan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi informasi sangat berkaitan dengan persepsi publik terhadap pembangunan. Di berbagai daerah, masyarakat cenderung menolak proyek infrastruktur atau industri bukan semata karena mereka tidak setuju terhadap pembangunan, tetapi karena mereka merasa dikesampingkan dalam arus informasi (Kamaruddin, 2024). Ketika alur komunikasi hanya bersifat satu arah dari pemerintah atau perusahaan kepada warga tanpa adanya dialog terbuka, maka masyarakat memandang pembangunan sebagai ancaman sosial maupun ekologis. Data menunjukkan bahwa proyek-proyek yang mengalami penolakan keras biasanya adalah proyek yang tidak melalui proses sosialisasi yang transparan, atau hanya memberikan informasi positif sambil menghilangkan potensi dampak negatif. Hal ini menegaskan bahwa transparansi memainkan peran strategis dalam membangun rasa kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan yang direncanakan.

Pembahasan tentang transparansi informasi juga tidak dapat dilepaskan dari peran media. Hasil kajian memperlihatkan bahwa media sering menjadi saluran utama masyarakat untuk mengetahui perkembangan proyek pembangunan dan isu lingkungan. Ketika media mampu menyampaikan informasi secara akurat, objektif, dan berdasarkan data, maka masyarakat dapat menilai secara rasional dampak pembangunan yang terjadi (Kurniati dkk., 2025). Namun dalam praktiknya, media seringkali terjebak pada framing sensational atau bias terhadap kepentingan tertentu. Pemberitaan yang hanya menonjolkan sisi positif pembangunan dapat menutupi risiko lingkungan yang sebenarnya signifikan. Sebaliknya, pemberitaan yang terlalu menekankan efek negatif tanpa data yang jelas dapat menciptakan ketakutan dan resistensi berlebihan. Oleh karena itu, transparansi informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pelaku proyek, tetapi juga tanggung jawab media sebagai penjaga moral informasi publik. Etika komunikasi mengharuskan media menyampaikan realitas secara utuh agar publik dapat terlibat dalam pembangunan secara bermakna dan kritis.

Dalam perspektif etika pembangunan, transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah praktik destruktif yang mengabaikan kelestarian lingkungan (Pambudi, 2025b). Temuan dalam berbagai dokumen pemerintah menunjukkan bahwa proyek pembangunan yang dilaksanakan dengan pola komunikasi tertutup cenderung lebih berisiko menghasilkan kerusakan ekologis. Ketika informasi dampak lingkungan tidak dibuka secara jelas, pengawasan publik menjadi lemah. Akibatnya, praktik seperti penggundulan hutan secara ilegal, pembuangan limbah berbahaya, atau penambangan tanpa rehabilitasi lahan lebih mudah terjadi. Dengan demikian, transparansi bukan hanya terkait aspek komunikasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan mekanisme pengawasan sosial terhadap pembangunan. Semakin

transparan suatu proyek, semakin besar pula kemungkinan tindakan pelanggaran lingkungan dapat dicegah sejak awal.

Dalam kajian teori etika komunikasi, transparansi dianggap sebagai bagian dari prinsip *right to know*, yaitu hak publik untuk memperoleh informasi yang memengaruhi kehidupan mereka (Al Fai'q dkk., 2024). Dalam konteks pembangunan, hal ini berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk memahami bagaimana proyek pembangunan akan memengaruhi kualitas udara, air, keanekaragaman hayati, dan struktur sosial mereka. Ketika prinsip ini dipenuhi, maka publik dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan akses informasi yang lengkap, partisipasi mereka menjadi lebih konstruktif. Mereka dapat memberikan saran, mengajukan masukan berdasarkan kearifan lokal, dan mendorong pemerintah maupun industri untuk melaksanakan mitigasi yang lebih bertanggung jawab. Hal ini membuktikan bahwa transparansi bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan menyimpulkan bahwa transparansi informasi merupakan fondasi utama bagi praktik etika komunikasi pembangunan yang benar-benar menjunjung nilai demokrasi dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa transparansi, komunikasi pembangunan hanya menjadi alat legitimasi, bukan ruang dialog. Tanpa transparansi, pembangunan akan kehilangan kontrol sosial dan moral yang diperlukan untuk memastikan kelestarian lingkungan. Sebaliknya, dengan transparansi yang kuat, pembangunan dapat berlangsung secara lebih adil, partisipatif, dan bertanggung jawab secara ekologis. Transparansi menjadi titik temu antara kepentingan pembangunan dan perlindungan lingkungan, menjadi dasar kepercayaan publik, serta menjadi mekanisme pencegahan paling efektif terhadap kerusakan ekologis yang dapat terjadi akibat komunikasi yang manipulatif atau tidak lengkap. Oleh karena itu, setiap aktor Pembangunan baik pemerintah, industri, maupun media wajib menempatkan

transparansi sebagai prinsip etis yang tidak dapat ditawarkan dalam setiap praktik komunikasi terkait pembangunan dan lingkungan.

2. Partisipasi Publik sebagai Wujud Komunikasi yang Demokratis dan Berkeadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik merupakan elemen inti dalam etika komunikasi pembangunan yang mengedepankan prinsip demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Partisipasi publik bukan sekadar mekanisme teknis untuk memenuhi persyaratan administratif, melainkan proses yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan yang memengaruhi ruang hidup mereka. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara nyata mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperkuat legitimasi kebijakan, serta mengurangi potensi konflik sosial maupun kerusakan ekologis. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa partisipasi publik menjadi landasan moral sekaligus strategis dalam menghubungkan pembangunan dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Analisis terhadap berbagai dokumen lingkungan dan pemberitaan media menunjukkan bahwa ketika proses pembangunan dilaksanakan tanpa partisipasi yang memadai, resistensi dari masyarakat menjadi sangat tinggi (Yusuf, 2014). Banyak proyek pembangunan seperti perluasan industri, pembangunan infrastruktur besar, atau pembukaan lahan skala luas mengalami penolakan bukan semata karena masyarakat anti-pembangunan, tetapi karena mereka tidak dilibatkan sejak awal. Warga sering kali merasa bahwa keputusan sudah dibuat sebelum mereka diberi kesempatan untuk memahami, menimbang, atau memberikan masukan. Hal ini memunculkan ketidakpercayaan dan anggapan bahwa pembangunan hanya menguntungkan pihak tertentu. Temuan ini mengonfirmasi bahwa partisipasi publik tidak dapat dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai kebutuhan fundamental untuk memastikan komunikasi pembangunan berjalan secara etis dan inklusif.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa partisipasi publik memiliki korelasi kuat dengan transparansi informasi. Masyarakat hanya dapat berpartisipasi secara efektif jika mereka memiliki akses terhadap informasi yang lengkap dan akurat mengenai proyek pembangunan. Tanpa informasi yang transparan, partisipasi publik tidak lebih dari ritual administratif yang semu (Gusman, 2023). Kajian literatur menunjukkan bahwa proses konsultasi publik yang dilakukan secara terbuka dan informatif mampu meningkatkan kualitas dialog antara pemerintah, pelaku proyek, dan masyarakat. Sebaliknya, konsultasi yang tertutup dan bersifat formalitas justru menciptakan ketegangan dan memperlebar ketimpangan kekuasaan. Dengan demikian, partisipasi publik bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga instrumen untuk memastikan keseimbangan informasi dalam komunikasi pembangunan.

Hasil analisis media juga mengungkapkan bahwa partisipasi publik sangat dipengaruhi oleh cara komunikasi dibangun antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Ketika komunikasi bersifat top-down, masyarakat cenderung pasif dan enggan menyampaikan pendapat karena merasa pendapat mereka tidak dihargai. Sebaliknya, ketika komunikasi dibangun secara dialogis melalui forum diskusi, musyawarah terbuka, atau tatap muka yang inklusif masyarakat menjadi lebih berani bersuara dan terlibat dalam proses keputusan. Forum partisipatif yang baik memungkinkan masyarakat mengajukan pertanyaan kritis, menyampaikan kekhawatiran, hingga memberikan solusi berbasis kearifan lokal. Temuan ini mendukung argumentasi bahwa komunikasi yang demokratis memerlukan ruang-ruang partisipatif yang tidak hanya mendengar, tetapi benar-benar mempertimbangkan suara publik.

Dalam perspektif etika lingkungan, partisipasi publik dianggap sebagai mekanisme untuk memperjuangkan keadilan ekologis. Kelompok masyarakat lokal, terutama yang tinggal di wilayah rentan secara ekologis, seringkali menjadi pihak yang

paling terdampak oleh Pembangunan. Namun dalam banyak kasus, mereka justru memiliki akses paling terbatas terhadap ruang partisipasi. Penelitian mengungkapkan bahwa ketika kelompok rentan tidak dilibatkan, pembangunan dapat menghasilkan dampak lingkungan yang berat seperti pencemaran air, hilangnya tanah adat, atau kerusakan hutan yang mengancam mata pencaharian (Hidayati & Suwanda, 2022). Karena itu, etika komunikasi menuntut adanya afirmasi, yaitu memastikan kelompok rentan memperoleh ruang lebih besar untuk berbicara dan berpengaruh. Dengan demikian, partisipasi publik bukan hanya persoalan prosedural, tetapi juga moral: bagaimana memastikan setiap individu dan kelompok memiliki kesempatan untuk melindungi lingkungan yang menopang kehidupan mereka.

Dalam praktik pembangunan berkelanjutan, partisipasi publik terbukti mampu mendorong solusi yang lebih adaptif dan kontekstual. Analisis kasus menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki pengetahuan ekologis yang tidak dimiliki oleh pemerintah atau perusahaan. Misalnya, pengetahuan mengenai pola aliran air, kondisi tanah, siklus tanaman, hingga ruang sakral adat. Ketika pengetahuan ini dimasukkan ke dalam proses perencanaan, risiko kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Hal ini menegaskan bahwa partisipasi publik tidak hanya memperkaya dimensi sosial pembangunan, tetapi juga memperkuat kualitas teknis keputusan lingkungan (Suryani, 2019). Dengan kata lain, pembangunan yang mengabaikan partisipasi publik kehilangan potensi besar untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal sebagai strategi mitigasi kerusakan ekologis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa partisipasi publik tidak dapat dipisahkan dari peran media sebagai saluran komunikasi. Media berfungsi menjembatani masyarakat dengan informasi pembangunan, menyediakan ruang diskusi publik, serta mengawasi proses konsultasi agar tidak sekadar formalitas. Media yang kritis dapat membantu mengungkap pelanggaran prosedur, manipulasi informasi, atau penyingkirkan suara

masyarakat. Dengan demikian, media merupakan aktor penting dalam memastikan bahwa partisipasi publik berjalan secara etis dan sesuai prinsip demokrasi. Namun penting pula dicatat bahwa media juga harus menjalankan fungsi ini dengan integritas, tidak terjebak pada kepentingan politik atau ekonomi yang dapat melemahkan suara publik.

Pembahasan ini menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan pilar penting dalam membangun etika komunikasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Partisipasi publik memberikan legitimasi sosial, memperkaya proses pengambilan keputusan, dan menjaga agar pembangunan tidak merugikan lingkungan maupun kelompok rentan. Melalui partisipasi yang bermakna, pembangunan dapat bergerak dari pendekatan instruktif menuju pendekatan dialogis yang berakar pada nilai demokrasi. Dengan demikian, upaya menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan atau teknologi, tetapi memerlukan komunikasi yang menghormati suara publik. Partisipasi publik adalah wujud dari komunikasi pembangunan yang benar-benar manusiawi, etis, dan berorientasi pada keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan.

3. Peran Media dalam Mengawal Etika Komunikasi Pembangunan dan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal etika komunikasi pembangunan dan lingkungan. Peran ini tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik, mengawasi pelaksanaan pembangunan, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, industri, serta masyarakat. Kajian dokumen dan analisis pemberitaan menunjukkan bahwa media dapat menjadi aktor yang memperkuat praktik komunikasi yang etis, namun di sisi lain juga berpotensi melemahkannya jika tidak menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pembahasan ini berargumentasi bahwa media adalah pilar penting dalam memastikan pembangunan

berjalan secara transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Temuan awal memperlihatkan bahwa media berperan sebagai penyedia informasi pertama yang diakses publik ketika terjadi aktivitas pembangunan yang berdampak pada lingkungan (Suri, 2019b). Berbagai laporan mengenai proyek tambang, pembangunan bendungan, pembukaan lahan, atau pembangunan kawasan industri seringkali menjadi sorotan media sebelum direspon oleh pihak pemerintah atau perusahaan. Dalam konteks ini, media berfungsi sebagai *early warning system* yang memberi sinyal kepada masyarakat mengenai potensi ancaman lingkungan. Namun, efektivitas fungsi ini sangat bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan. Ketika media mampu menghadirkan data yang akurat, penjelasan yang seimbang, dan analisis yang mendalam, masyarakat dapat memahami konteks pembangunan secara lebih objektif. Sebaliknya, jika media menyampaikan informasi yang bias, sensasional, atau minim verifikasi, opini publik dapat terbentuk secara keliru dan memicu ketegangan sosial.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan dalam membingkai isu lingkungan (*environmental framing*). Kerangka pemberitaan ini memengaruhi cara publik memaknai dampak pembangunan. Misalnya, pemberitaan yang menonjolkan keuntungan ekonomi tanpa membahas risiko ekologis dapat menciptakan persepsi bahwa pembangunan hanya berdimensi positif (M. F. Akbar dkk., 2019). Sementara itu, pemberitaan yang terlalu menekankan konflik dapat memicu ketakutan dan resistensi berlebihan. Analisis framing yang dilakukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa media tidak selalu netral; struktur kepentingan politik dan ekonomi sering mempengaruhi arah pemberitaan. Oleh sebab itu, peran media dalam mengawal etika komunikasi pembangunan harus dilihat secara kritis: media dapat menjadi penjaga moral (*moral guardian*), tetapi juga dapat menjadi alat legitimasi

pembangunan yang tidak berkelanjutan jika tidak diawasi dan tidak memegang etika jurnalistik.

Media juga ditemukan berperan sebagai ruang deliberasi publik, yaitu tempat masyarakat dapat membahas, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap Pembangunan (Siregar dkk., 2023). Melalui artikel opini, liputan investigasi, talk show, dan diskusi publik, media membuka ruang bagi berbagai sudut pandang, termasuk suara kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan. Di sinilah media berperan penting dalam memastikan komunikasi pembangunan berjalan secara demokratis. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika media memberi ruang kepada masyarakat lokal, pakar lingkungan, dan aktivis ekologis, wacana pembangunan menjadi lebih beragam dan komprehensif. Namun ketika media hanya menghadirkan suara pemerintah atau korporasi, komunikasi pembangunan menjadi timpang dan tidak mencerminkan prinsip keadilan informasi.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa media memiliki peran signifikan sebagai agen kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan. Liputan investigatif mengenai pelanggaran AMDAL, pencemaran sungai, perusakan hutan, atau konflik lahan seringkali memicu respons cepat dari pemerintah maupun perusahaan. Dalam banyak kasus, upaya mitigasi lingkungan atau evaluasi proyek pembangunan baru dilakukan setelah pemberitaan media menarik perhatian public (Zulmi, 2017). Hal ini membuktikan bahwa media dapat menjadi alat akuntabilitas yang memaksa aktor pembangunan untuk menjalankan kewajibannya secara etis dan sesuai regulasi. Di sisi lain, temuan menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, media justru tidak melakukan liputan kritis karena tekanan politik atau iklan dari perusahaan. Inilah tantangan terbesar dalam peran media: menjaga independensi agar informasi lingkungan tidak terdistorsi oleh kepentingan tertentu.

Dalam konteks komunikasi pembangunan yang etis, media juga berperan penting dalam mendorong literasi lingkungan di masyarakat. Informasi mengenai perubahan iklim, risiko kerusakan ekologi, dan pentingnya keberlanjutan seringkali pertama kali dipahami publik melalui pemberitaan media (Adnan dkk., 2025). Analisis menunjukkan bahwa media yang konsisten menyajikan edukasi lingkungan baik melalui artikel mendalam maupun kampanye lingkungan berkontribusi meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Kesadaran ini sangat penting karena menjadi modal sosial bagi partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan. Dengan demikian, media tidak hanya mengawal etika komunikasi, tetapi turut membentuk masyarakat yang peka terhadap isu lingkungan.

Media digital dan media sosial memperluas dinamika komunikasi pembangunan. Dengan penyebaran informasi yang cepat dan luas, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mengawasi pembangunan secara langsung (Basir dkk., 2009). Temuan penelitian menunjukkan bahwa video amatir, unggahan warga, dan laporan warga berbasis media sosial seringkali menjadi sumber awal investigasi jurnalis. Hal ini membuktikan bahwa media tidak lagi memiliki monopoli informasi; masyarakat kini berperan sebagai *co-producers* informasi yang menuntut akurasi dan transparansi lebih tinggi dari aktor pembangunan. Namun, media sosial juga membawa risiko penyebaran misinformasi. Oleh sebab itu, peran media profesional menjadi semakin penting dalam melakukan verifikasi dan klarifikasi.

Pembahasan ini menegaskan bahwa media merupakan pilar kunci dalam menjaga etika komunikasi pembangunan dan lingkungan. Melalui informasi yang benar, ruang deliberasi yang adil, serta kontrol sosial yang kuat, media dapat memastikan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan keberlanjutan. Namun peran ini hanya dapat berjalan efektif jika media mempraktikkan etika jurnalistik yang ketat, menjaga independensinya, dan berpihak pada kebenaran ekologis. Dengan demikian, media

bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi merupakan aktor etis yang menentukan kualitas komunikasi pembangunan secara keseluruhan.

4. Keadilan Ekologis sebagai Tujuan Etika Komunikasi Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan ekologis merupakan tujuan utama dari etika komunikasi pembangunan, terutama pada konteks pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Keadilan ekologis tidak hanya berbicara mengenai pembagian manfaat pembangunan, tetapi juga distribusi risiko dan dampak lingkungan secara adil, terutama bagi kelompok yang rentan secara sosial, ekonomi, maupun geografis. Temuan penelitian menegaskan bahwa praktik komunikasi pembangunan yang tidak mengedepankan keadilan ekologis seringkali melahirkan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam, memperparah kerusakan lingkungan, dan menciptakan marginalisasi terhadap masyarakat lokal. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan ekologis bukan sekadar konsep etis, tetapi sebuah tuntutan struktural yang harus hadir dalam setiap bentuk komunikasi pembangunan.

Analisis dokumen dan pemberitaan media menunjukkan bahwa berbagai proyek pembangunan seringkali menghadirkan dampak lingkungan yang berat, tetapi dampak tersebut lebih banyak ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Misalnya, pencemaran air dari industri, deforestasi akibat ekspansi lahan, dan polusi udara dari aktivitas pabrik. Kelompok masyarakat yang terdampak biasanya tidak memiliki akses informasi yang memadai, tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak memperoleh kompensasi yang layak atas kerusakan ekologis yang mereka alami (Sumule, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadilan ekologis merupakan konsekuensi langsung dari komunikasi pembangunan yang tertutup dan tidak etis. Dengan kata lain, komunikasi yang tidak berpihak pada kebenaran ekologis secara langsung menghasilkan ketidakadilan sosial.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa keadilan ekologis sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Komunikasi pembangunan seringkali lebih banyak menonjolkan manfaat ekonomi jangka pendek, seperti peningkatan pendapatan daerah atau penciptaan lapangan kerja, sementara risiko ekologis diminimalkan atau disembunyikan. Pola komunikasi ini memunculkan persepsi yang tidak seimbang, seolah-olah pembangunan tidak memiliki konsekuensi terhadap kelestarian lingkungan. Dalam banyak kasus, masyarakat hanya mengetahui dampak ekologis setelah kerusakan terjadi, misalnya munculnya penyakit akibat polusi atau kehilangan sumber penghidupan akibat degradasi tanah. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi yang tidak transparan adalah akar dari ketidakadilan ekologis, karena merampas hak masyarakat untuk mengetahui dan melindungi lingkungan hidup mereka.

Kajian terhadap beberapa kasus lingkungan menunjukkan bahwa ketika komunikasi pembangunan memasukkan nilai-nilai keadilan ekologis, proses pembangunan dapat berlangsung lebih aman, demokratis, dan berkelanjutan. Misalnya, proyek yang melibatkan masyarakat lokal dalam identifikasi risiko, perencanaan mitigasi, serta monitoring dampak lingkungan cenderung menghasilkan keputusan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap ekosistem (Suliantoro & Murdiati, 2013). Dalam konteks ini, keadilan ekologis bukan hanya soal membagi manfaat secara merata, tetapi memastikan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk menjaga lingkungan melalui komunikasi yang inklusif. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa etika komunikasi memiliki peran besar dalam mewujudkan keadilan ekologis.

Hasil analisis menunjukkan pula bahwa keadilan ekologis tidak dapat dipisahkan dari prinsip partisipasi publik. Keadilan baru bisa tercapai ketika semua pihak yang terdampak memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan ekologis mereka. Namun kenyataannya, masyarakat adat, petani kecil, dan nelayan seringkali menjadi

pihak yang paling sedikit dilibatkan. Mereka dianggap tidak memiliki kapasitas teknis untuk memahami isu pembangunan, padahal mereka memiliki pengetahuan ekologis lokal yang sangat penting. Ketika suara mereka dikesampingkan, keputusan pembangunan menjadi bias kepentingan dan mengabaikan keberlanjutan ekosistem. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi pembangunan yang adil harus memberi ruang lebih besar bagi kelompok rentan agar terjadi pemerataan kekuasaan dalam menentukan nasib lingkungan mereka.

Dalam perspektif etika lingkungan, keadilan ekologis menuntut setiap aktor pembangunan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan tidak hanya terhadap generasi saat ini, tetapi juga generasi mendatang. Oleh karena itu, komunikasi pembangunan harus memasukkan perspektif jangka panjang, bukan hanya mengejar target ekonomi sesaat. Hasil kajian memperlihatkan bahwa ketika komunikasi dibangun dengan perspektif antargenerasi, keputusan pembangunan cenderung lebih hati-hati dan berorientasi pada pelestarian ekologis (Pambudi, 2025c). Misalnya, penggunaan teknologi ramah lingkungan, praktik rehabilitasi lahan, serta mekanisme pengurangan polusi lebih sering muncul dalam proyek yang menekankan prinsip keadilan ekologis. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang etis tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengarahkan perilaku pembangunan agar tidak merusak ekologis.

Media juga memainkan peran penting dalam mendorong keadilan ekologis. Dalam beberapa kasus, investigasi media berhasil mengungkap praktik-praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Liputan mengenai pencemaran industri, konflik agraria, atau eksplorasi hutan seringkali menjadi katalis perubahan kebijakan pemerintah. Namun penelitian menunjukkan bahwa media juga dapat gagal menyoroti isu keadilan ekologis ketika terjebak pada pemberitaan yang mengutamakan aspek ekonomi atau kepentingan politik (Rahayu, 2012). Oleh karena itu, peran media dalam keadilan ekologis memerlukan integritas dan keberpihakan pada fakta ekologis.

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa keadilan ekologis adalah tujuan akhir dari etika komunikasi pembangunan. Pembangunan yang tidak menjunjung keadilan ekologis berpotensi menciptakan ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang berkepanjangan. Sebaliknya, ketika komunikasi pembangunan mengedepankan transparansi, partisipasi, dan keberpihakan pada kelompok rentan, maka pembangunan dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan etis. Keadilan ekologis menempatkan manusia dan lingkungan pada posisi yang setara, saling terkait, dan saling membutuhkan. Oleh karena itu, etika komunikasi pembangunan harus memastikan bahwa setiap keputusan pembangunan mempertimbangkan keseimbangan ekologis sebagai prinsip utama, bukan sebagai aspek tambahan. Dengan demikian, komunikasi pembangunan yang etis menjadi kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih lestari dan berkeadilan bagi semua.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa etika komunikasi merupakan elemen fundamental yang menentukan keberhasilan pembangunan sekaligus keberlanjutan lingkungan. Transparansi informasi, partisipasi publik, peran media, dan keadilan ekologis terbukti saling terkait dalam membentuk proses komunikasi yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Ketika setiap aktor pembangunan pemerintah, masyarakat, media, dan sektor swasta mampu menjalankan komunikasi secara etis, maka pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga menjamin perlindungan ekosistem serta kesejahteraan jangka panjang. Sebaliknya, pengabaian etika komunikasi berpotensi menimbulkan konflik sosial, manipulasi informasi, dan kerusakan lingkungan yang merugikan banyak pihak. Karena itu, penguatan etika komunikasi harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan

komunikasi yang berkeadaban, pembangunan dapat berjalan selaras dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, F., Fadilah, R. A., & Purwanto, E. (2025). Peran Media Digital dalam Mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan. *Interaction Communication Studies Journal*, 1(4), 12–12.
- Akbar, M. F., Putubasai, E., & Asmaria, A. (2019). Peran Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat. *Komunika*, 2(2), 111–127.
- Akbar, R. A., Fauzan, M., Arsyad, A. A. J., & Barki, K. (2023). Implementasi pendekatan community empowerment untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 65–76.
- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas dan Trasparansi dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Arifin, P., & Ardhiyahsyah, N. N. (2020). Penerapan komunikasi pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan desa wisata berbasis kearifan lokal di Yogyakarta. *Jurnal Nomosleca*, 6(1). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/view/3958>
- Basir, A., Haron, M. S., & Musa, N. Y. (2009). Kebebasan media komunikasi menurut perspektif Islam. *Jurnal Hadhari*, 2(1), 65–82.
- Damanik, Z. G., & Hardi, S. C. (2025). Peran Dan Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Menilai Kelayakan Bisnis Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pada Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Aceh (SIA). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 173–187.
- Ema, E., Saleh, A., & Budianto, H. (2018). Diskursus Pembangunan Poros Maritim Dunia: Telaah Kritis Kebijakan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(1), 43–53.
- Ervianto, W. I. (2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional indonesia. *Simposium li Uniid 2017*, 2(1), 98–103.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.

- Gusman, D. (2023). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif. *UNES Law Review*, 5(3), 847–862.
- Hidayati, R., & Suwanda, I. M. (2022). Upaya Pemerintah kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat melalui Media Center Surabaya sebagai Wujud Good Governance. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(4), 824–841.
- Imanina, K. (2020). Penggunaan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif Analitis dalam PAUD. *Jurnal AUDI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD*, 5(1), 45–48.
- Kamaruddin, S. A. (2024). Dampak Pembangunan Industri di Pedesaan. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. <https://aksiologi.pubmedia.id/index.php/aksiologi/article/view/283>
- Kurniati, P., Nursyamsiah, S., Barokah, A., & Saryono, S. (2025). Peran Strategis Media Massa dalam Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Jurnal Citizenship Virtues*, 5(1), 62–69.
- Leontinus, G. (2022). Program dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGS) dalam hal masalah perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1), 43–52.
- Pambudi, A. S. (2025a). Aksiologi Pengembangan Sawit: Etika dan Nilai dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 6(3), 104–115.
- Pambudi, A. S. (2025b). Aksiologi Pengembangan Sawit: Etika dan Nilai dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 6(3), 104–115.
- Pambudi, A. S. (2025c). Aksiologi Pengembangan Sawit: Etika dan Nilai dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 6(3), 104–115.
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(01), 317–329.
- Rahayu, M. I. F. (2012). Keadilan Ekologis dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah. *Jurnal Yudisial*, 5(1), 17–35.

- Ramadhan, G., Bahri, S., Hasibuan, W. R., & Pramasha, R. R. (2024). Peran Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal Dan Regional. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 2(2), 437–444.
- Ramadhani, P. N., Pradety, S. N., & Hanum, A. A. (2025). Pelanggaran Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Kehumasan Pemerintah: Penanganan Proyek e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi*, 6(1), 36–47.
- Santoso, M. B., & Raharjo, S. T. (2021). Diskursus corporate social responsibility (CSR) dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs). *Share: Social Work Journal*, 11(2), 100–121.
- Siregar, N. M., Hidayat, A., Marlina, M., & Lubis, N. F. (2023). Mempertegas hukum dan mengawal pembangunan nasional dengan pendekatan pers yang humanis:(Media dan masyarakat). *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 3(2).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi/article/view/35703/0>
- Suliantoro, B. W., & Murdiati, C. W. (2013). Konsep Keadilan Sosial Yang Berwawasan Ekologis Menurut Vandana Shiva: Kajian dari Perspektif Etika Lingkungan. *ICSSIS (The 5th International Conference on Indonesia Studies: "Ethnicity and Globalization")*. <https://icssis.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/09/2013-01-08.pdf>
- Sumule, L. (2024). Melampaui Antropocentrism: Ekoteologi dan Etika Lingkungan dalam Dialog, Sebuah Pendekatan Interdisipliner Untuk Keberlanjutan dan Keadilan Ekologis. *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja*, 8(2), 166–178.
- Suri, D. (2019a). Pemanfaatan media komunikasi dan informasi dalam perwujudan pembangunan nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177–187.
- Suri, D. (2019b). Pemanfaatan media komunikasi dan informasi dalam perwujudan pembangunan nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177–187.
- Suryani, S. (2019). Layanan Informasi Publik dan Partisipasi Publik. *Studia Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 63–76.
- Yulianti, D. (2017). Program generasi berencana (genre) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 93–108.

Yusuf, A. W. (2014). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id>.

Zulmi, F. (2017). Keberpihakan media terhadap isu pelestarian lingkungan hidup. *Jurnal Kata: Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra*, 1(2), 101–108.